

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tulisan ini mengkaji tentang pandangan kaum salafi terhadap pemilihan umum (pemilu) di Indonesia, baik pemilihan legislatif (pileg) 2014 maupun pemilihan presiden (pilpres) 2014. Dipilihnya salafi dalam hal ini karena dari sisi ideologi, salafi mengusung ideologi puritan dengan slogan kembali kepada Al-Qur'an dan Hadith dengan mencontoh amalan para sahabat dan *salafus shalih*.¹ Dengan demikian, dakwah salafi diklaim sebagai gerakan dakwah yang mengajarkan dan mengamalkan syari'at secara murni. Dakwah yang kaum salafi lakukan berkembang dan bergerak di berbagai daerah dan lapisan masyarakat. Kaum salafi menjaga agar tidak terkontaminasi oleh kelompok atau organisasi yang bertentangan dengan Islam, sehingga terwujud Islam yang *rahmatan lil 'alamin*.

Selain itu menurut kaum salafi, gerakan *hizbiyyah* (kelompok atau partai yang berdakwah melalui jalur politik) adalah cara baru yang tidak ada dasar hukumnya. Kaum salafi menilai gerakan tersebut membuat tujuan utama berdakwah terabaikan karena terfokus pada kepentingan politik sendiri (fanatisme golongan). Dengan demikian, kaum salafi melawan seluruh bentuk fanatisme golongan seperti partai politik. Realitasnya, partai politik cenderung

¹Syaikh Muhammad bin Rabi' bin Hadi Al Madkholi dan Abu Hasan Musthofa bin Isma'il As Sulaimani, *Perbedaan Ahlus Sunnah dan Ahlul Bid'ah Menuju Pemahaman Salaf* terj. Abu Usamah Ibnu Rowiyah An Nawawy (Tegal: Maktabah Salafy Press, 2001), 17.

hanya memobilisasi massa untuk meraih kekuasaan semata (pragmatism kekuasaan).²

Syaikh Nashiruddin Al Albani, dalam buku karangan Syaikh Abdul Malik Al Jazair yang berjudul *Haramkah Partai, Pemilu, Parlemen: Fatwa Syaikh Nashiruddin Al Albani*, berpendapat bahwa kaum muslimin terlarang masuk dalam parlemen karena dipastikan melakukan penyimpangan dari ajaran Islam. Bentuk penyimpangannya yakni melakukan mu'amalat riba pada lembaga-lembaga pemerintahan.³ Hakekatnya, anggota-anggota parlemen dipilih melalui proses pemilu. Dalam pemilihan umum keputusan akhir diserahkan pada suara mayoritas. Menurutnya, suara mayoritas bukan kehendak Tuhan dan hal ini bertentangan dengan Islam. Dalam Islam, kekuasaan adalah milik Allah dan muslim dilarang menyerahkan kekuasaan pada kaum mayoritas yang belum tentu memperjuangkan Islam.⁴

Menurut M. Imdadun Rahmat, dakwah kaum salafi terfokus pada Islamisasi masyarakat dan tidak menyentuh wilayah politik (non-politis). Dalam menjalankan dakwahnya, kaum salafi juga tidak boleh membentuk organisasi massa, karena bertentangan dengan prinsip *non-hizbiyyah*.⁵

Berdasarkan temuan-temuan di atas, spekulasi pemikiran-pemikiran kaum salafi menjadi bahan diskusi yang menarik dan perlu diperjelas. Indonesia yang masih dalam proses demokrasi membutuhkan kerjasama dari

²Luqman Baabduh, *Musuh-musuh Dakwah Tauhid* (Asy Syari'ah, 2006), 24.

³Syaikh Abdul Malik Al Jazair, *Haramkah Partai, Pemilu, Parlemen: Fatwa Syaikh Nashiruddin Al Albani* (Yogyakarta: Media Hidayah, 1999), 55-56.

⁴*Ibid.*, 57.

⁵M. Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2009), 119.

warga Indonesia sendiri sebagai bentuk partisipasinya. Hakekatnya, setiap warga negara memiliki hak berpartisipasi aktif atau pun pasif untuk menentukan pilihan, termasuk kaum salafi.

Meskipun demikian, setidaknya kaum salafi minimal memiliki pemikiran dan pandangan politik untuk diaplikasikan dalam sistem demokrasi Indonesia sesuai dengan pemahamannya. Sistem demokrasi merupakan salah satu ide Barat yang diadopsi dan diimplementasikan oleh Indonesia dalam sistem pemerintahannya. Dalam demokrasi, rakyat memiliki hak untuk menyampaikan aspirasinya.⁶ Realitasnya, demokrasi tidak lepas dari unsur yang dinamakan pemilihan umum (pemilu). Rakyat secara tidak langsung diminta berpartisipasi dalam demokrasi.

Prinsip-prinsip negara demokrasi kemudian dituangkan ke dalam konsep yang lebih praktis, sehingga dapat diukur dan dicirikan. Affan Gaffar, setelah mengamati demokrasi di berbagai negara merumuskan demokrasi menjadi lima indikator. Maka, diperlukan prasyarat untuk mengamati apakah suatu tatanan politik merupakan sistem demokratis atau tidak, yaitu:⁷

Pertama, akuntabilitas. Dalam demokrasi, setiap pemegang jabatan publik yang dipilih rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan segala kebijakannya, baik yang akan dilakukan maupun yang telah diimplementasikan kepada masyarakat. Selain itu, pemegang jabatan juga harus mempertanggungjawabkan kata-katanya dan perilakunya selama

⁶Affan Gaffar, *Politik Indonesia Menuju Transisi Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 5.

⁷*Ibid.*, 7-8.

memegang jabatan publik. Dalam konteks ini, pemegang jabatan bersedia menghadapi *public scrutiny* (penyelidikan kritis masyarakat), terutama yang dilakukan media massa.

Kedua, rotasi kekuasaan. Dalam demokrasi, peluang terjadinya rotasi kekuasaan harus ada dan dilakukan secara teratur dan damai, sehingga tidak hanya satu orang yang selalu memegang jabatan, sementara peluang lain tertutup. Biasanya, partai politik yang menang pada pemilu diberi kesempatan membentuk eksekutif, sehingga dapat mengendalikan pemerintah sampai pemilihan berikutnya. Dalam negara yang tingkat demokrasiya masih rendah, rotasi kekuasaan hanya dilakukan terbatas dikalangan elit politik saja.

Ketiga, rekrutmen politik terbuka. Untuk memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan, diperlukan satu sistem rekrutmen politik yang terbuka. Artinya, setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi jabatan politik yang dipilih oleh rakyat mempunyai kesempatan yang sama. Sedangkan, negara yang tidak demokratis, rekrutmen politik dilakukan secara tertutup. Artinya, peluang untuk mengisi jabatan politik dilakukan beberapa orang saja.

Keempat, pemilihan umum (pemilu). Dalam suatu negara yang demokratis, pemilu dilaksanakan secara teratur dengan asas jujur dan adil tanpa rekayasa. Setiap warga negara yang telah memenuhi syarat mempunyai hak untuk memilih dan dipilih serta bebas menggunakan haknya sesuai dengan nuraninya. Rakyat bebas untuk menentukan partai atau calon mana yang akan didukungnya, tanpa rasa takut dan paksaan dari orang lain. Pemilih

juga bebas mengikuti segala macam aktifitas pemilihan, seperti kegiatan kampanye dan menyaksikan perhitungan suara.

Kelima, menikmati hak-hak dasar. Dalam suatu negara yang demokratis, setiap masyarakat dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas, seperti hak untuk menyatakan pendapat (*freedom of expression*) digunakan untuk menentukan preferensi politiknya, hak untuk berkumpul atau berserikat (*freedom of assembly*) ditandai dengan kebebasan menentukan lembaga atau organisasi yang dibentuk dan dipilihnya serta hak untuk menikmati pers yang bebas (*freedom of the press*).

Berdasarkan rincian lima indikator di atas, maka perlu adanya pembatasan kajian skripsi ini dengan hanya meliputi pandangan dan tanggapan kaum salafi tentang pemilihan umum (pemilu) dan mengetahui mekanisme/prosedur memilih pemimpin menurut kaum salafi.

Pemilihan umum sebagai metode sistem demokrasi tujuannya memilih perwakilan rakyat sebagai pembuat hukum dan memilih pemimpin untuk menjalankan hukum yang dibuat perwakilan rakyat tersebut. Konsekuensinya masyarakat diminta terlibat dengan pijakan keputusan mayoritas. Siapa yang layak dipilih, kriterianya menjadi keputusan suara mayoritas. Berkaitan dengan ini, Samuel P. Huntington dalam Sahid Gatara (2009: 207) menyebutkan bahwa demokrasi adalah pemilihan para pemimpin secara kompetitif oleh rakyat yang (bakal) mereka pimpin.⁸

⁸Sahid Gatara, *Ilmu Politik Memahami dan Menerapkan* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), 26.

Pemilihan umum adalah suatu hal yang penting dalam kehidupan kenegaraan. Pemilu merupakan pengejawantahan sistem demokrasi, melalui pemilihan umum rakyat memilih wakilnya untuk duduk dalam parlemen, dan dalam struktur pemerintahan. Pemilihan umum telah dianggap menjadi ukuran demokrasi karena rakyat dapat berpartisipasi menentukan sikapnya terhadap pemerintahan dan negaranya. Ada negara yang menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk dalam parlemen, akan tetapi ada pula negara yang juga menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih para pejabat tinggi negara.⁹

Pemilihan umum dan pemilihan kepala pemerintahan keputusannya diserahkan pada suara mayoritas. Suara mayoritas dinilai kaum salafi bukan kehendak dari Tuhan karena suara mayoritas belum tentu menjamin tidak berbuat kesalahan dan kesesatan.¹⁰ Solusi untuk memecahkan persoalan umat Islam menurut kaum salafi dengan kembali pada hukum kehidupan yang diciptakan Allah SWT sebagai Sang Pencipta yakni Al-Qur'an dan Hadith.

Selanjutnya partai politik berfungsi sebagai penyambung lidah masyarakat dengan terpilihnya wakil-wakil rakyat. Realitas yang terjadi, partai politik gagal membawa amanah dari rakyat. Perjuangan partai politik untuk rakyat kurang terlihat, yang terlihat justru akomodasi kepentingannya sendiri lebih dominan. Secara konseptual, kaum salafi menggunakan istilah *hizb* untuk menunjukkan kelompok atau partai sebagai gerakan politik yang tujuan

⁹Sahid Gatara, *Ilmu Politik Memahami dan Menerapkan...*,27.

¹⁰Ahmad Bunyan Wahib, *Gerakan Dakwah Salafi Paska Laskar Jihad* (2007),

utamanya kekuasaan bukan dakwah. Cara berdakwah melalui *hizb* tidak ada landasan hukumnya dan tujuan utama berdakwah diabaikan.¹¹

Kaum salafi di Majelis Taklim Raudlatul Amin desa Ketapang Daya, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang berjumlah kurang lebih 30 orang yang terdiri dari 2 orang ustadz dan 28 orang jama'ah. Kaum salafi di Majelis Taklim Raudlatul Amin desa Ketapang Daya, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang merupakan kumpulan orang-orang yang ingin memahami dan mengamalkan Al-Qur'an dan Hadith. Al-Qur'an dan Hadith sebagai metode pemahaman dan pengamalan yang mana telah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat.¹²

Pilihan penelitian terhadap kaum salafi majelis taklim Raudlatul Amin adalah karena pemikiran politik kaum salafi majelis taklim Raudlatul Amin menarik untuk diteliti, terutama terkait dengan pandangan kaum salafi Raudlatul Amin terhadap demokrasi, khususnya pemilihan umum (pemilu). Kaum salafi Raudlatul Amin berpandangan bahwa demokrasi adalah produk yang dihasilkan dari Barat dan tidak sesuai dengan Islam. Hal ini dapat dilihat dari ajaran yang disampaikan oleh ustadz salafi yang selalu menekankan untuk kembali kepada Al-Qur'an dan Hadith dalam semua aspek kehidupan.

Selain itu, alasan lain dipilihnya kaum salafi majelis taklim Raudlatul Amin dalam penelitian ini karena dari sisi ideologi, salafi mengusung ideologi puritan dengan slogan kembali kepada Al-Qur'an dan Hadith dengan

¹¹Ahmad Bunyan Wahib, *Gerakan Dakwah Salafi...*, 26.

¹²Sumardi, Ustadz Salafi, *Wawancara*, Sampang, 18 April 2014.

mencontoh amalan para sahabat dan *salafus shalih*. Jadi segala hal yang tidak berasal dari Al-Qur'an dan Hadith mereka tolak.

Hakekatnya, seluruh kaum muslim berhak menyebarkan dakwah seluas-luasnya pada masyarakat dengan tidak menjadi kelompok yang inklusif. Kaum salafi di Majelis Taklim Raudlatul Amin desa Ketapang Daya, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang ini tidak berdiri di bawah naungan struktur apapun yang mengikat. Cara dakwahnya yakni dari keinginan pribadi kemudian bercerita pada teman, tetangga, saudara kemudian didirikan Majelis Taklim tersebut. Dari satu orang tersebar ke orang lain yang tertarik setelah mendengarkan dakwah salafi, kemudian tersebar ke desa lain. Penyebaran itu kemudian mendapat respon dari orang yang ingin belajar salafi, sehingga Ustadz salafi diminta menyampaikan *Taklim*. Maka, tidak ada yayasan, organisasi bahkan pondok pesantren formal untuk mengaturnya, artinya kesadaran orang untuk menunaikan kebutuhan manusia dalam beragama.¹³

Selain itu, peneliti mendapatkan fakta yang menarik terkait dengan partisipasi politik kaum salafi di Majelis Taklim Raudlatul Amin desa Ketapang Daya, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang dalam pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) kabupaten Sampang. Faktanya adalah bahwa dalam pemilukada tersebut, kaum salafi di Majelis Taklim Raudlatul Amin desa Ketapang Daya, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang lebih memilih untuk tidak menggunakan hak suaranya atau golongan putih (golput). Meskipun demikian, golongan putih (golput) merupakan bentuk partisipasi

¹³Observasi di Majelis Taklim Raudlatul Amin Desa Ketapang Daya, 21 Maret 2014.

politik rakyat yang kecewa dengan kepemimpinan pemerintahan sebelumnya sehingga dalam pemilu kemudian rakyat memutuskan untuk tidak memilih. Hal ini termasuk juga kaum salafi yang kecewa dengan kepemimpinan pemerintahan sebelumnya sehingga memilih untuk golput dalam pilukada kabupaten Sampang yang lalu.¹⁴ Oleh karena itu kemudian peneliti ingin melakukan penelitian terhadap kaum salafi Raudlatul Amin terkait pandangannya terhadap pemilihan umum, baik itu pemilihan umum legislatif (pileg) dan pemilihan umum presiden (pilpres). Terutama dalam pilpres yang akan ditentukan pemimpin Indonesia selanjutnya. Selain itu, terkait dengan itu, peneliti juga ingin meneliti terkait dengan mekanisme dalam memilih pemimpin menurut kaum salafi Raudlatul Amin. Hal ini menarik karena menurut kaum salafi, Islam memiliki mekanisme sendiri dalam memilih pemimpin.

Pemikiran kaum salafi tentang pemilu merupakan hal yang menarik untuk diteliti karena kaum salafi berpandangan bahwa pemilu itu buruk dan hanya sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan oleh para elit politik. Berdasarkan realitas di atas, peneliti ingin mengupas secara mendalam tentang pandangan kaum salafi Majelis Taklim Raudlatul Amin di desa Ketapang Daya terhadap pemilihan umum. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul **“PANDANGAN KAUM SALAFI RAUDLATUL AMIN DESA KETAPANG DAYA TERHADAP PEMILIHAN UMUM (PEMILU) DI KABUPATEN SAMPANG.”**

¹⁴Observasi di Majelis Taklim Raudlatul Amin Desa Ketapang Daya, 21 Maret 2014.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan kaum salafi Majelis Taklim Raudlatul Amin desa Ketapang Daya terhadap pemilihan umum (pemilu), baik pemilu legislatif (pileg) 2014 maupun pemilu presiden (pilpres) 2014 di Indonesia?
2. Bagaimana mekanisme/prosedur memilih pemimpin menurut kaum salafi Majelis Taklim Raudlatul Amin desa Ketapang Daya?

C. Tujuan Penelitian

1. Menghasilkan deskripsi tentang pandangan kaum salafi Majelis Taklim Raudlatul Amin desa Ketapang Daya tentang pemilihan umum (pemilu), baik pemilu legislatif (pileg) 2014 maupun pemilu presiden (pilpres) 2014 di Indonesia.
2. Menghasilkan deskripsi mekanisme/prosedur memilih pemimpin menurut kaum salafi Majelis Taklim Raudlatul Amin desa Ketapang Daya.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, tulisan ini dapat menghasilkan sebuah pemahaman baru tentang pandangan kaum salafi di Majelis Taklim Raudlatul Amin desa Ketapang Daya dalam merespon pemilihan umum (pemilu) dan mengetahui mekanisme/prosedur memilih pemimpin menurut kaum salafi Majelis Taklim Raudlatul Amin desa Ketapang Daya.
2. Secara praktis, manfaat tulisan ini dapat berimplikasi bagi pembaca khususnya:

- a. Mahasiswa Prodi Politik Islam dapat mengetahui bagaimana pandangan kaum salafi tentang pemilu sehingga dapat digunakan sebagai pertimbangan-pertimbangan keilmuan dalam bidang akademis dan mengetahui mekanisme/prosedur memilih pemimpin menurut kaum salafi Majelis Taklim Raudlatul Amin desa Ketapang Daya, kecamatan Ketapang, kabupaten Sampang, sehingga kemudian akan diketahui sejauh mana peran kaum salafi dalam kehidupan sosial-kemasyarakatan.
- b. Pembaca pada umumnya dapat mengetahui pandangan kaum salafi Majelis Taklim Raudlatul Amin tentang pemilu sehingga dapat memberikan kesepahaman berpikir tanpa harus menghakimi satu sama lain terhadap kebenaran dan mampu memahami mekanisme prosedur memilih pemimpin menurut kaum salafi Majelis Taklim Raudlatul Amin.

E. Telaah Pustaka

Untuk menjadi bahan kajian dalam penelitian skripsi ini peneliti menggunakan buku-buku, artikel-artikel atau catatan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian judul skripsi. Selain itu, peneliti menjadikan buku-buku karya asli kaum salafi sebagai rujukan untuk menghindari kesalahpahaman penafsiran sehingga mendapat sumber bacaan yang otentik. Buku karya Syaikh Abdul Malik Al Jazairi yang berjudul "*Haramkah Partai, Pemilu, Parlemen: Fatwa Syaikh Nashiruddin Al Albani*" (Yogyakarta: Media

Hidayah, 1999) yang mengkaji tentang partai, pemilu, dan parlemen dari sisi hukum Islam apakah halal atau haram. Buku tersebut menyoroti permasalahan partai yang muncul bagai jamur pada musim hujan dari sisi syari'at.

Selanjutnya, karya Syaikh Muhammad bin Rabi' bin Hadi Al Madkholi dan Abu Hasan Mushthofa bin Isma'il As Sulaiman yang berjudul: "*Perbedaan Ahlus Sunnah dan Ahlus Bid'ah Menuju Pemahaman Salaf*" (Tegal: Maktabah Salafi Press, 2001) berisi tentang penjelasan tentang Salaf dan Salafiyah serta menyingkap tabir perbedaan antara *Ahlu Sunnah* dan *Ahlu Bid'ah* dengan tujuan membongkar kedok-kedok *hizbiyyun* dan menjelaskan kebenaran jalan *Ahlu Sunnah Wal Jama'ah* dengan maksud mendapatkan istiqomah dari Allah SWT.

Selanjutnya, menurut kaum salafi dalam pemilihan pemimpin telah diajarkan dalam Islam. Ajaran Islam tentang pemilihan pemimpin juga dikonsepsikan oleh Imam Al Mawardi dalam kitab "*Al Ahkam Al Sulthaniyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari'at Islam*" terjemahan Fadli Bahri (Jakarta: Darul Falah, 2006) tentang keharusan adanya bentuk pemerintahan dalam Islam tetapi dengan pertimbangan-pertimbangan rasional sehingga dapat memfasilitasi kepentingan umat Islam.

Di Indonesia pemikiran gerakan Islam diamati oleh M. Imdadun Rahmat dalam bukunya "*Arus Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia*" (Jakarta: Erlangga, 2009), mempunyai titik tekan asal mula gerakan Salafiyah dari Timur Tengah, tujuan dakwah kaum salafi diantaranya kembali pada Al-Qur'an dan Hadith yang otentik, mendidik kaum

muslim dari syirik, bid'ah yang tidak dikenal dari ajaran-ajaran Islam, dan lain-lain. Selain itu, dakwah kaum salafi dalam buku tersebut juga dinyatakan berprinsip *non-hizbiyyah*. Dakwah kaum salafi melawan seluruh fanatisme golongan berdasarkan partai atau tidak.

Buku pendukung lainnya yakni karangan Afadlal dkk, "*Islam dan Radikalisme di Indonesia*" (Jakarta: LIPI Press, 2005) berisi tentang sejarah masuknya dakwah kaum salafi ke Indonesia, perkembangan salafi di Indonesia pasca Laskar Jihad, dakwah salafi dideskripsikan dalam buku tersebut mengharapkan mengubah wajah Indonesia sesuai sudut pandang salafi yakni mengikuti praktek Islam yang murni mengikuti tiga generasi yaitu sahabat, *tabi'in*, dan *tabiut tabi'in*, dan politik bukan menjadi tekanan dalam dakwah kaum salafi.

Selain itu, skripsi yang ditulis oleh Lilis Agustulistiwa dengan judul "*Perilaku Politik Kaum Salafi (Respon terhadap Demokrasi di Kabupaten Blitar)*". Skripsi ini meneliti tentang perilaku politik kaum salafi dalam merespon sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia, khususnya di kabupaten Blitar yang menjadi lokasi penelitian. Dalam skripsi ini, kaum salafi berpendapat bahwa sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia merupakan sistem yang tidak sesuai dalam Islam. Dalam sistem demokrasi, rakyat tidak memahami konsekuensi demokrasi itu sendiri, sehingga dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan politik kelompok-kelompok tertentu.

Jurnal yang ditulis oleh Slamet Muliono Redjosari dengan judul “*Politik Dalam Perspektif Kaum Salafi*” (Jurnal Review Politik: Kajian Islam dan Politik, Volume 01, Nomor 02). Jurnal ini menjelaskan tentang pandangan dan perilaku politik kaum salafi. Dalam jurnal ini kaum salafi berpandangan bahwa berpolitik saat ini adalah “dengan meninggalkan gelanggang politik.” Berpolitik dengan terjun langsung di panggung kekuasaan, justru akan membahayakan dan menghilangkan identitas Islam. Seharusnya, aktivitas dalam panggung politik itu adalah dalam rangka menegakkan syari’at Islam di tengah masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam skripsi penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian lapangan (*field research*) sesuai dengan obyek yang peneliti pilih sebagai deskripsi komunitas secara langsung (data sebenarnya) di lapangan.¹⁵ Hal ini dilakukan karena disini peneliti ingin meneliti secara langsung terhadap fakta sosial. Penelitian yang berjenis penelitian lapangan ini dengan memaparkan serta mengkaji sumber-sumber data yang terdiri dari literatur-literatur ataupun referensi-referensi yang berkaitan dengan judul penelitian, di samping itu juga lewat tanya-jawab dengan informan.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti mengupas secara mendalam terkait dengan pandangan kaum salafi di Majelis Taklim Raudlatul Amin

¹⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2007), 307.

desa Ketapang Daya, kecamatan Ketapang, kabupaten Sampang terhadap pemilihan umum (pemilu) di Indonesia, baik pemilihan legislatif (pileg) 2014 maupun pemilihan presiden (pilpres) 2014. Dengan demikian, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif.

Metode penelitian kualitatif dipilih karena metode ini memiliki varian yang beragam untuk menganalisis secara mendalam masalah yang terjadi, agar dapat melihat kenyataan-kenyataan yang ada pada obyek penelitian sehingga peneliti dapat menjelaskan kenyataan tersebut secara ilmiah. Metode sangat penting dalam sebuah penelitian sebab tujuan utama penelitian adalah untuk memecahkan masalah.¹⁶

Oleh karena itu, langkah-langkah yang ditempuh harus relevan dengan masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian yang digunakan peneliti. Metode penelitian tersebut terdiri atas; lokasi penelitian, tipe penelitian dan dasar penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pemilihan informan, dan metode analisis data. Metode ini sangat berguna dalam penelitian kualitatif ini untuk mendapatkan variasi permasalahan karena berkaitan dengan tingkah laku manusia (perilaku).¹⁷

Metode kualitatif dalam penelitian ini dilaksanakan dalam bentuk deskripsi. Dalam penelitian ini dilakukan deskripsi untuk mendapatkan informasi yang mendalam. Laporan penelitian ini disusun dalam bentuk narasi bersifat kreatif dan mendalam serta menunjukkan ciri-ciri

¹⁶Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 149.

¹⁷*Ibid.*, 150.

naturalistik secara otentik.¹⁸ Dengan demikian, fokus analisis penelitian ini adalah pandangan kaum Salafi terhadap pemilihan umum, baik pemilihan umum legislatif (pileg) maupun pemilihan umum presiden (pilpres) di Indonesia.

Selain itu, penggunaan metode kualitatif juga sebagai cara peneliti untuk berpikir secara induktif, yaitu peneliti menangkap berbagai fakta atau fenomena-fenomena sosial melalui pengamatan di lapangan, kemudian menganalisisnya dan berupaya melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan apa yang diamati. Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berwujud kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati (*observable*).¹⁹

Jadi diharapkan dengan metode penelitian ini, peneliti akan mudah untuk menggambarkan hasil penelitian. Selain itu dengan pendekatan kualitatif ini, peneliti mendapatkan data berupa hasil wawancara dengan narasumber yang sudah ditentukan untuk dikelola, dimana peneliti tetap kritis terhadap data yang didapatkan.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Ketapang Daya, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan karena kaum salafi Majelis Taklim Raudlatul Amin berdomisili dan

¹⁸Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah* (Kediri: STAIN Kediri, 2007), 3.

¹⁹Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 5.

melakukan kegiatannya di Desa Ketapang Daya, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang. Kaum salafi ini merupakan kaum salafi yang berdakwah dengan tidak bernaung di bawah institusi atau struktur tertentu. Kaum salafi Majelis Taklim Raudlatul Amin merupakan kumpulan orang-orang yang ingin memahami dan mengamalkan Al-Qur'an dan Hadith. Selain itu, kaum salafi mengajak masyarakat yang ingin mempelajari Islam secara murni berdasarkan Al-Qur'an dan Hadith dengan cara berdakwah.²⁰

Sedangkan waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan April sampai bulan Juli tahun 2014. Waktu penelitian ini diambil karena mengingat pada tanggal 9 April 2014 akan diadakan Pemilu Legislatif 2014 dan pada tanggal 9 Juli 2014 diadakan Pemilu Presiden sehingga penelitian ini akan tepat waktunya apabila dilaksanakan pada bulan-bulan tersebut karena sesuai dengan tema penelitian ini yakni pandangan kaum Salafi tentang pemilihan umum (pemilu) 2014, baik pemilihan umum legislatif (pileg) 2014 maupun pemilihan umum presiden (pilpres) 2014 di Indonesia.

3. Sumber Data

Sumber data untuk penelitian ini digolongkan menjadi dua bagian berdasar kebutuhan, sebagai berikut:

a. Sumber Primer

²⁰Sumardi, Ustadz Salafi, *Wawancara*, Sampang, 18 April 2014.

Sumber primer merupakan sumber data utama (sumber data orang pertama) dan kebutuhan mendasar dari penelitian ini. Sumber data diperoleh dari hasil wawancara dengan informan utama saat terjun langsung ke lapangan tempat penelitian. Informan adalah sumber utama dalam penelitian. Informan dipilih berdasarkan kebutuhan, serta berkaitan dengan tema penelitian.²¹

Kriteria sumber data primer adalah orang yang berpengaruh (Ustadz dan Jama'ah) dalam komunitas kaum salafi di kabupaten Sampang dan mampu mengeksplor data-data yang mendukung judul skripsi ini serta anggota kaum salafi untuk menyamakan persepsi para pemuka kaum salafi. Ustadz yang akan dijadikan sumber primer yakni Ustadz Badrut Tamam dan Ustadz Sumardi. Selanjutnya untuk lebih menguatkan data, maka peneliti menambahkan lagi para jama'ah dari kaum salafi Majelis Taklim Raudlatul Amin desa Ketapang Daya sebagai narasumber. Sampel jama'ah kaum salafi yang akan peneliti ambil sebagai narasumber berjumlah 8 orang jama'ah. Jadi total narasumber yang dijadikan sumber primer dalam penelitian ini berjumlah 10 orang. Alasan memilih sumber primer karena membutuhkan informan untuk data-data skripsi sesuai judul tersebut agar data-data yang didapat menjadi valid karena berasal dari kaum salafi sendiri.

²¹Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, 7.

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari hal-hal yang berkaitan dengan pemikiran politik kaum salafi, antara lain berasal buku, jurnal, artikel, majalah *online*, dan *browsing* di internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yakni membicarakan tentang bagaimana cara peneliti mengumpulkan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data antara lain sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Metode observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan pengamatan menggunakan panca indera. Marshall menyatakan bahwa, "*Through observation, the researcher learn about behavior and the meaning attached to those behavior*". Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut.²² Adapun observasi yang dilakukan peneliti termasuk dalam jenis observasi non-partisipasif.

Observasi yang dilakukan oleh peneliti melalui pendekatan kultural karena peneliti berasal dari desa yang sama dengan objek penelitian. Sehingga tidak ditemui kesulitan ketika peneliti mencoba masuk ke lingkungan yang diteliti. Pada tanggal 17 Maret 2014,

²²Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan...*, 310.

peneliti mengunjungi Kepala Desa Ketapang Daya untuk minta izin melakukan penelitian di daerahnya. Setelah izin diperoleh, selanjutnya peneliti melakukan observasi awal pada tanggal 21 Maret 2014 dengan melihat kegiatan yang dilakukan oleh kaum salafi Raudlatul Amin.

Setibanya peneliti di lokasi, selain melakukan observasi peneliti mendatangi ustadz Badrut Tamam untuk meminta izin melakukan penelitian di majelis taklim Raudlatul Amin. Alhamdulillah ustadz Badrut Tamam sangat terbuka dan menerima kedatangan peneliti. Kemudian peneliti mulai menyampaikan maksud dan membuka jati diri peneliti yang sesungguhnya. Beliau bersedia untuk membantu peneliti dan memberikan apa saja data yang dibutuhkan.

Dalam metode observasi ini, peneliti tidak hanya mengamati obyek studi tetapi juga mencatat hal-hal yang terdapat pada obyek tersebut. Selain itu metode ini peneliti gunakan untuk mendapatkan data tentang situasi dan kondisi secara universal dari obyek penelitian, yakni letak geografis atau lokasi penelitian dan dinamika dakwah di Majelis Taklim Raudlatul Amin Desa Ketapang Daya.

b. Metode Wawancara (*interview*)

Metode wawancara atau *interview* adalah sebuah dialog yang dilakukan secara mendalam (*in-depth interview*) oleh pewawancara untuk memperoleh keterangan atau informasi dari terwawancara. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi

dan ide melalui tanya-jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²³

Wawancara dilakukan dengan dua cara antara lain sebagai berikut:

Pertama, wawancara tertutup adalah wawancara secara bebas tanpa pedoman wawancara (*guide*). Sekalipun tanpa pedoman, wawancara tetap diarahkan pada kebutuhan data yang hendak dikumpulkan dengan berlangsung secara alamiah dan kondisional.

Kedua, wawancara terbuka adalah wawancara yang dilakukan dengan menggunakan sederet daftar pertanyaan lengkap dan terinci serta diperlihatkan pada terwawancara.

Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait sebagaimana yang tercantum dalam sumber data primer yaitu dua orang ustadz salafi (Ustadz Badrut Tamam dan Ustadz Sumardi) dan delapan orang jama'ah kaum salafi Majelis Taklim Raudlatul Amin desa Ketapang Daya.

Wawancara kepada informan dilakukan di tempat dan waktu yang berbeda-beda. Hal ini disesuaikan dengan kegiatan masing-masing narasumber yang berbeda-beda. Meskipun demikian terkadang peneliti juga mengikuti pengajian yang dilakukan oleh Majelis Taklim Raudlatul Amin. Tujuannya adalah supaya peneliti lebih dekat dengan objek penelitian yakni kaum salafi Majelis Taklim Raudlatul Amin.

²³Fadjarul Hakam Chozin, *Cara Mudah Menulis Karya Ilmiah* (Tropodo: Alpha, 1997), 64-65.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri benda-benda tertulis sebagai data historis.²⁴ Adapun metode dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah buku-buku, catatan-catatan, majalah-majalah, surat kabar, internet, dan koran yang memiliki kaitan dengan penelitian skripsi ini.

5. Teknik Pemilihan Informan

Informan penelitian dipilih dengan menggunakan teknik *Snowball Sampling*. Awalnya informan pertama ditentukan oleh peneliti yang dianggap sebagai *key* informan. Kemudian diperoleh beberapa informan yang terkait dengan penelitian. Informan dibagi menjadi dua antara lain:

Pertama, dua orang ustadz kaum salafi Majelis Taklim Raudlatul Amin di Desa Ketapang Daya, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang yaitu Ustadz Badrut Tamam dan Ustadz Sumardi. *Kedua*, jama'ah Majelis Taklim Raudlatul Amin di Desa Ketapang Daya, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang yang berjumlah 8 orang. Semua informan dalam penelitian merupakan orang-orang yang berada dalam Majelis Taklim Raudlatul Amin. Alasan peneliti memilih 10 orang informan tersebut adalah berdasarkan umur, pekerjaan, dan tingkat pendidikan. Dari segi usia, rata-rata informan berumur di kisaran 25 tahun sampai 45 tahun. Dari

²⁴Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial...*, 152.

aspek pekerjaan, 2 orang informan bekerja di sektor swasta (pegawai swasta), 3 orang bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS), 3 orang orang sebagai petani, dan 2 orang sebagai pedagang. Dari tingkat pendidikan semua informan merupakan lulusan dari sekolah menengah atas (SMA). Hanya beberapa orang saja yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi (kuliah). Semuanya memiliki pemahaman sendiri terkait dengan tema penelitian ini yaitu, pandangan kaum salafi tentang pemilihan umum 2014 di Indonesia baik pileg maupun pilpres. Jumlah informan dapat ditambah jika data yang dibutuhkan belum cukup. Tingkat kejenuhan data menjadi pembatas akhir jumlah subyek penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasi data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁵ Model analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah model interaktif. Model inilah yang kemudian dipakai oleh peneliti untuk menganalisa data-data yang diperoleh di lapangan. Model interaktif terdiri dari tiga hal utama, yaitu; reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Ketiga kegiatan tersebut adalah kegiatan sebelum, selama, dan sesudah

²⁵Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, 248.

pengumpulan data dalam bentuk sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis.²⁶ Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh dalam model analisis data kualitatif tersebut sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses memilih, pemfokusan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakkan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis dari lapangan (*field notes*). Reduksi data berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung.²⁷

Peneliti menyeleksi setiap data yang didapatkan di lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah dan sedang dilakukan. Seleksi data dilakukan atas dasar data yang didapat sesuai dengan pokok penelitian yang diteliti. Kemudian peneliti meringkas data yang telah diseleksi dengan uraian yang singkat agar mudah dipahami. Dengan demikian, proses reduksi data bertujuan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang bagian data yang tidak diperlukan, serta mengorganisasi data sehingga memudahkan penarikan kesimpulan, kemudian dilanjutkan dengan proses verifikasi. Misalnya data seperti pandangan kaum salafi terkait konsep pemilihan umum (pemilu). Peneliti mencari data kepada informan terkait dengan tema di atas, kemudian peneliti menyeleksi data yang diperoleh tersebut sesuai dengan kebutuhan penelitian.

²⁶Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (Jakarta: Erlangga, 2011), 148.

²⁷Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, 150.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.²⁸ Dalam penyajian data, peneliti akan lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Artinya, setelah proses reduksi selesai dilakukan, peneliti menyajikan data secara terstruktur. Misalnya data disusun sesuai dengan rumusan masalah di atas. Seperti data tentang pandangan kaum salafi terkait dengan pemilihan umum.

c. Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Peneliti menginterpretasi data yang telah tersaji, kemudian merumuskan pola dan tema, melihat data dan mencoba mereduksinya kembali, sehingga proses ini merupakan proses yang interaktif. Sejak pemulaan pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola penjas, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin ada, alur sebab-akibat dan proposisi.²⁹

Proses verifikasi hasil temuan dilakukan secara selintas dengan mengingat hasil temuan-temuan terdahulu dan melakukan cek silang (*cross check*) dengan temuan lainnya. Dengan melakukan verifikasi, peneliti dapat mempertahankan dan menjamin validitas dan reliabilitas

²⁸Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, 249.

²⁹*Ibid.*, 152.

hasil temuan. Contohnya peneliti memverifikasi data yang diperoleh tentang pandangan kaum salafi terhadap pemilu dengan melakukan cek silang dengan temuan data lainnya. Selain itu, peneliti menanyakan kembali kepada narasumber terkait dengan hasil wawancara.

G. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah dalam memahami penelitian skripsi ini, sistematika pembahasan penelitian ini terdiri dari beberapa komponen yang sistematis terbagi menjadi lima bab masing-masing terdiri dari sub bab yang saling berkaitan satu sama lain. Kerangka penelitiannya sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan berupa permulaan dari kajian skripsi, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, kerangka konseptual berisi tentang salafi meliputi makna salafi, akar munculnya kaum salafi, varian kaum salafi, dan sejarah kaum salafi Indonesia. Selain itu bab ini juga meliputi teori gerakan keagamaan, pemilihan umum (pemilu) di Indonesia, konsep demokrasi, konsep kepemimpinan, dan kepemimpinan menurut kaum salafi.

Bab ketiga, setting penelitian berisi gambaran umum lokasi, kaum salafi Majelis Taklim Raudlatul Amin desa Ketapang Daya, pandangan kaum salafi Majelis Taklim Raudlatul Amin desa Ketapang Daya tentang pemilihan

umum (pemilu), dan mekanisme memilih pemimpin menurut kaum salafi Majelis Taklim Raudlatul Amin desa Ketapang Daya.

Bab keempat, tentang makna politik dan pemilu menurut kaum salafi majelis taklim Raudlatul Amin desa Ketapang Daya meliputi makna politik bagi kaum salafi Raudlatul Amin desa Ketapang Daya, pandangan kaum salafi Raudlatul Amin desa Ketapang Daya terhadap demokrasi, pandangan kaum salafi Raudlatul Amin desa Ketapang Daya tentang pemilihan legislatif (pileg) 2014 dan pemilihan presiden (pilpres) 2014, pandangan kaum salafi Raudlatul Amin terhadap pemerintah, kriteria pemimpin menurut kaum salafi Raudlatul Amin desa Ketapang Daya, mekanisme/prosedur memilih pemimpin menurut kaum salafi Raudlatul Amin desa Ketapang Daya, dan tipologi gerakan kaum salafi Raudlatul Amin.

Bab kelima, penutup berisi simpulan dan saran atau rekomendasi hasil penelitian.